

HAK-HAK ASASI MANUSIA: TANTANGAN BAGI TEOLOGI?

BERNHARD KIESER, SJ

Seharusnya hak-hak asasi manusia tetap merupakan tantangan bagi teologi – dan bukan saja bagi teologi katolik. Franz Magnis-Suseno membuka rangkaian karangan ORIENTASI BARU ini dengan mengingatkan tugas teologi: "Adalah tantangan bagi teologi Indonesia untuk menempatkan perjuangan demi hak-hak asasi manusia di pusat kesadaran umat kristiani Indonesia". Tugas itu tidak terbatas pada teologi; segala usaha pewartaan Gereja menghadapi tugas yang sama. Silakan pembaca sendiri bertanya, apakah pewartaan kristiani menghadapi tantangan itu. Pada akhir rangkaian karangan ini pantas ditinjau, apakah dengan beberapa karangan yang termuat di sini teologi Indonesia mulai menghadapi tantangan itu?

Stéphane Hessel, adalah salah satu dari sedikit orang yang dulu ikut merumuskan Deklarasi Universal perihal Hak-hak Asasi Manusia dan kini masih hidup. Hessel berbahasa dan berkebangsaan Jerman, keturunan yahudi. Pada masa Perang Dunia II ia tidak gugur dalam kamp konsentrasi; setelah perang ia menjadi warga negara dan diplomat Prancis dan hadir waktu Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia ditandatangani. Tahun 1998 Hessel mengenangkan saat resolusi PBB lima puluh tahun yang lalu, katanya,

"Tak mungkin diragukan: Saat resolusi (tentang Hak-hak Asasi Manusia) ini ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1948, di Paris, adalah saat utama dari abad 20. ... Sebab saat itu merupakan peralihan sejarah. Waktu perang (dunia II) berakhir, kami yakin: entah dunia akan runtuh sama sekali, entah tumbuh sesuatu yang sama sekali baru. Dan yang baru – apa itu? Kemenangan dari suatu visi baru, yakni dari suatu visi lain mengenai manusia dan masyarakat. Bagi orang muda sekarang ini, hak-hak asasi manusia dan

demokrasi tampaknya biasa; di masa mudaku, demokrasi dipandang sebagai salah satu di antara banyak bentuk negara, dan hak-hak asasi manusia dibicarakan sebagai catatan kaki berkaitan dengan Revolusi Prancis. Sejak tanggal 10 Desember 1948 berlaku: suatu bentuk negara atau suatu pemerintah legitim, hanya kalau kekuasaannya dipakai dan dipertanggungjawabkan untuk melindungi martabat manusia. Sejak itu, segala sesuatu menjadi lain".¹

Maka tidak mengherankan, bahwa – akhirnya – ilmu ketuhanan dalam semua agama ikut mengangkat "hak-hak asasi manusia" sebagai isu, sebagaimana – sepiantas – dapat dilihat dalam karangan-karangan di atas ini. Kalau jeli, teologi kristiani dapat melacak perlindungan martabat manusia sampai pada karangan-karangan nabi Perjanjian Lama: "Nabi seperti Amos jelas membela hak manusia untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan Allah."² Teologi dapat menemukan hormat akan hidup yang ilahi dan yang insani dalam tulisan Injil Yohanes; untuk menggugat mereka yang menganggap diri punya "a license to kill"³. Bukankah hormat pada manusia, pribadi di hadapan Allah, yang perlu ditebus, sudah merupakan pokok perhatian Katolik maupun Protestan dalam gerakan reformasi empat setengah abad yang lalu?⁴ Bukankah teologi dan spiritualitas Gereja di Amerika Latin dan di pelbagai kawasan dunia lain, telah mengembangkan suatu paradigma holistik – artinya: universal-sejati – untuk mengartikan dan memperjuangkan martabat segala yang hidup?⁵

Agama-agama – termasuk Gereja – terlibat dalam membela manusia; juga teologi terlibat untuk mengembangkan pengertian hak-hak asasi manusia; suatu "Visi Politik Pembebasan berhadapan dengan Kolonialisme" adalah awal sejarah Gereja di Indonesia⁶ dan teologi modern di Indonesia bernarasi mengenai HAM, supaya benar-benar terjadi mimesis. Dalam pertemuan antaragama kita temukan, bahwa dialog antaragama merupakan hak asasi yang lebih asasi dan mendesak daripada kebebasan. Tetapi: **Apakah** dengan menggali khazanah dan mengembangkan perhatian seperti itu, **teologi memang sudah mengerjakan tugasnya?**

1. "Apabila kita mau menjamin bahwa kejahatan-kejahatan tidak diteruskan, kita harus sepenuh tenaga memperjuangkan, bersama seluruh bangsa, hormat terhadap hak-hak asasi manusia." (Magnis-Suseno). Hormat pada martabat setiap manusia dan semua hak asasi lainnya merupakan satu-satunya jalan supaya kehancuran berhenti dan hidup dapat berlangsung terus. Tahun 1948, Deklarasi

Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia tidak lahir dari tradisi filsafat! Deklarasi PBB menanggapi pengalaman, bahwa masyarakat dan negara modern – demi kebebasan! – mengancam dan memusnahkan hidup dan pribadi manusia. HAM lahir dari ancaman! Maka apakah wajar kita mencari hak-hak asasi manusia pertamanya dalam kekayaan khasanah tradisi dan budaya (termasuk budaya kristiani); ataukah kita mengangkat tuntutan hak-hak asasi dengan berjerih-payah membangun hidup bersama kita supaya setiap orang mendapat tempat dan tak seorang pun menjadi korban! Hak-hak asasi manusia berwujud tuntutan etis; dan teologi (yang suka menggali tradisi) tidak usah takut terjerumus dalam debat dan perjuangan etika. M. Suhartono bagaikan menyimpulkan: "Realitas Allah dikenali sebagai suatu imperatif etis".

- Bagaimana lagi teologi dapat men-suara-kan Allah, kalau tidak terlibat pada tuntutan etis yang paling mendesak?
2. Tuntutan hak-hak asasi manusia dipenuhi dengan meng-adab-kan-nya (A.Sudiarja). Maka perhatian untuk hak-hak asasi tidak mungkin lepas dari budaya lokal. Namun, kita juga harus "mengumandangkan isu HAM dalam hubungan internasional, semata-mata dengan alasan bahwa HAM itu sifatnya universal" (I.Wibowo). Keprihatinan mengenai hak-hak asasi manusia adalah universal, karena tidak mengecualikan seorang pun (dan oleh sebab itu, keprihatinan akan hak-hak asasi manusia merupakan basis hidup bersama seluas dunia); sekaligus perhatian konkret untuk hak-hak asasi manusia harus menemukan mereka semua, yang *hic et nunc* menjadi korban hidup bersama. Perjuangan untuk hak asasi manusia berawal dari analisis sosial (budaya?), dan hanya berlangsung kalau terpadu dengan kelompok-kelompok yang membentuk masyarakat kita. Teologi tidak usah takut bahwa agendanya didikte oleh kelompok lain; sama seperti seluruh Gereja ia hanya "menempuh perjalanan bersama dengan seluruh umat manusia, bersama dengan dunia mengalami nasib keduniaan yang sama ..." agar "masyarakat manusia ... ditransformasi menjadi keluarga Allah"(GS no. 40).
- Apakah teologi kristiani (dan bidang hidup iman lainnya) sudah terlanjur dilibatkan oleh "dunia" itu dalam perjuangannya yang paling sengit: demi martabat setiap manusia?

3. "Hak-hak asasi manusia adalah selalu hak orang lain!", kata (*horribile dictu*) Rosa Luxemburg. Perjuangan HAM untuk hak orang lain. Dan oleh karena alasan yang sama: hanya orang lain dapat membuat kita sadar, betapa hidup dan tindakan kita sendiri menindas orang. Jemaat kristiani butuh dikritik agar kita melihat, bagaimana liturgi dan aturan hukum gerejawi menempatkan anggota-anggota kita sendiri pada pinggiran dan bagaimana pewartaan membuat orang tidak dapat bicara lagi. Demi kesungguhan dan kejujuran, kritik hak asasi manusia tidak boleh dikalahkan dengan pernyataan-pernyataan dogmatik dan didiamkan demi ketaatan hierarkis.
- Apakah teologi telah berhasil menyuarkan kritik hak asasi dalam uraiannya mengenai umat Allah dan hierarki, dalam pertimbangannya mengenai perayaan Ekaristi dan mengenai kewajiban untuk sakramen tobat, dalam penjelasannya mengenai perkawinan dan terutama dalam katekese yang harusewartakan Kristus dalam kata-kata yang kena di hati orang sekarang?
4. Sebab: "Bahasa hak-hak asasi manusia adalah bahasa abad yang akan datang, dan abad yang baru itu telah mulai pada tahun 1989," kata Stéphane Hessel. Gereja lahir supayaewartakan kabar gembira Kristus dalam bahasa yang akan datang: dalam bahasa Yunani, mulai dari Rasul Paulus sampai rumus-rumus Konsili Nikea dan Khalkedon; dalam bahasa universitas, mulai dari Albertus Agung dan Thomas dari Aquino (yang untuk pertama kali mengajarkan teologi di universitas); dalam bahasa perjuangan sosial, mulai dengan von Ketteler dan Rerum Novarum. Dewasa ini, kristologi berusaha untuk mengungkapkan misteri kehadiran Allah dalam sejarah manusia, demi ribuan juta orang, yang hidup dalam agama lain dan yang tak pernah akan menjadi kristiani; dan teologi moral modern berusaha untuk meneguhkan iman orang-orang kristiani dalam tanggung jawab mereka yang tak mungkin mereka serahkan kepada entah siapa. Dengan semua *instructiones* dan ensiklik dari Magisterium gerejawi, belum tuntas juga semua usaha teologi pewartaan lintas agama dan teologi moral otonom. Kini teologi menghadapi tantangan baru. Teologi adalah ilmu bahasa dan harus mencari kejelasan:

- Bagaimana kita, orang kristiani, dapat berkisah mengenai penebusan, dalam bahasa hak-hak asasi manusia, ya itu dalam bahasa keprihatinan demi setiap orang dan bahasa perhatian politik untuk mereka yang menjadi korban hidup bersama kita?

Semoga teologi kita menjadi hidup dalam menghadapi tantangan-tantangan hak-hak asasi manusia.

CATATAN

- 1 Disadur dari: DIE ZEIT, 10 Desember 1998, no. 51, hlm. 10.
- 2 St. Darmawijaya, Nabi sebagai Reformator?, di atas ini, hlm 87.
- 3 M. Suhartono, A License to Kill?, di atas hlm. 155.
- 4 lihat: M. Purwatma, "Membenarkan Manusia": Mengangkat Martabat Manusia, di atas ini hlm. 122 dan B.T Adeney-Risakotta, Reformasi Gereja dan HAM, di atas ini hlm. 60.
- 5 J.B. Banawiratma, Gereja Universal – HAM Universal? di atas hlm. 76.
- 6 F. Hasto Rosariyanto, Visi Politik Pembebasan Gereja Berhadapan dengan Kolonialisme, di atas hlm. 41.